KONSTRUKSI MEDIA ONLINE TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) COVID-19 DKI JAKARTA

ONLINE MEDIA CONSTRUCTION ON LARGE-SCALE OF SOCIAL RESTRICTIONS (LSSR) POLICY COVID-19 DKI JAKARTA

Denune Gentastilar Wangsemukti¹ dan Nasrullah²

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

Email :

¹denunegentas@gmail.com; ²nasrullah@umm.ac.id

ABSTRACT

The Large-Scale Social Restriction Policy (PSBB) is decided by the government to reduce the number of the spread of the COVID-19 pandemic in the DKI Jakarta Province. This study aims to describe how online media constructs this policy through media framing. The two media studied were detik.com and narasi.tv. Framing analysis uses the Robert N Etman concept to determine problem identification, casual interpretation, treatment recommendation, and moral evaluation. The results showed that the two media construct PSBB differently. Detik.com sees PSBB as a policy formed as a result of community disobedience to health protocols. This media constructs society and COVID-19 as actors causing policy. Meanwhile, Narasi.tv sees the PSBB as a form of government flight from responsible. This media tends to blame government for the high number of COVID-19 cases in DKI Jakarta.

Keywords: *Framing Analysis; COVID-19; Large-Scale Social Restrictions (LSSR)*

ABSTRAK

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diputuskan oleh Pemerintah untuk menekan jumlah penyebaran pandemi COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana media *online* mengkonstruksi kebijakan tersebut melalui framing media. Dua media yang diteliti adalah detik.com dan narasi.tv. Analisis framing menggunakan konsep Robert N. Entman untuk menentukan *problem identification, casual interpretation, treatment recommendation, dan moral evaluation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua media mengkonstruksi peristiwa PSBB secara berbeda. Detik.com melihat PSBB sebagai kebijakan yang terbentuk akibat ketidaktaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Media ini mengkonstruksi masyarakat dan COVID-19 sebagai aktor penyebab kebijakan. Sedangkan Narasi.tv melihat PSBB sebagai bentuk pelarian pemerintah dari tanggung jawab. Media ini cenderung menyalahkan pemerintah atas tingginya kasus COVID-19 di DKI Jakarta.

Kata Kunci: Analisis Framing; COVID-19; Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 serempak seluruh media memberitakan *penyebaran Corona Virus Disease 19* (COVID-19). Virus baru tersebut diduga berasal dari Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 dan menyebar relatif cepat, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan sebagai pandemi atau wabah penyakit global. Seluruh dunia dibuat ramai dengan adanya virus baru ini, tidak terkecuali Indonesia.

Kasus pertama COVID-19 di Indonesia baru diumumkan pada 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo dan langsung membanjiri informasi di seluruh *platform* media pada bulan tersebut. Tidak menunggu waktu lama virus meluas ke berbagai daerah, sehingga pemerintah mengeluarkan serangkaian upaya pencegahan hingga imbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang, rajin mencuci tangan, memakai masker, hingga membatasi ruang gerak masyarakat melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Kebijakan PSBB diberlakukan pertama oleh DKI Jakarta sebagai salah satu episentrum penyebaran pertama COVID-19 di Indonesia. Walaupun sempat ditolak oleh pemerintah, tetapi melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 memberikan kewenangan bagi DKI Jakarta melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Urgensi pemberlakuan kebijakan PSBB di DKI Jakarta didasarkan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana pemberlakuan penanggulangan COVID-19 melalui

kebijakan PSBB tersebut dilakukan sejak 7 April 2020.

Ditinjau melalui trends.google.com, kebijakan PSBB di DKI Jakarta menarik perhatian lebih dibandingkan kebijakan penanggulangan COVID-19 serupa di daerah lain, kebijakan larangan mudik, atau bahkan subsidi listrik. Selain menjadi daerah pertama yang memberlakukan PSBB, Jakarta merupakan daerah dengan mobilitas tinggi sehingga membuat virus dengan mudah menyebar. Pada masa orde baru posisi Jakarta menjadi pusat dari segala aktifitas termasuk media informasi. Pola media informasi sentralis oleh pemerintah orde baru dimana pemberitaan seputar Jakarta merupakan berita utama atau sering disebut Jakarta-sentris (Suparno, 2018). Maka dengan melihat kompleksitasnya membuat penanggulangan COVID-19 serta pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta menarik perhatian masyarakat.

Pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta membagi dua opini besar. Pada satu sisi pemerintah berusaha mencari solusi karena kebijakan tersebut berdampak luas terhadap masyarakat berpenghasilan rendah karena sangat mempengaruhi ruang gerak mereka untuk mencari nafkah. Namun desakan untuk diberlakukannya PSBB disampaikan oleh berbagai pihak, seperti mantan wakil presiden sekaligus ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kedua opini besar tersebut mewarnai berbagai pemberitaan seputar PSBB yang diberlakukan, akibat pandemi COVID-19 berlangsung di mana internet dan media massa sudah terpadu menggeser televisi sebagai media informasi utama.

Hasil riset tahun 2018 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyatakan DKI Jakarta menempati urutan ketiga nasional dengan penggunaan internet dengan penetrasi 80,4%. Wilayah urban seperti Jakarta menggunakan internet sudah menjadi gaya hidup masyarakat untuk memperoleh informasi aktual. Hal ini didasari media *online* memiliki ritme kerja yang fleksibel, aktual dan mudah diakses karena disebarluaskan melalui media sosial (Fikri, 2015). Sehingga media seperti televisi, surat kabar, dan radio mulai terkonversi secara daring agar dapat menarik impresi.

Seiring dengan perkembangan media yang terintegrasi secara *online* tetapi tidak diiringi dengan objektivitas dalam menentukan angle berita. Subjektifnya media terhadap pemegang kekuasaan atau suatu kepentingan mewarnai media. Melihat media adalah suatu perusahaan yang menyajikan informasi ke masyarakat dengan bantuan pendanaan dari konglomerat (Shoemaker & Pamela Reese, 2014). Sehingga sikap objektif dan mengedepankan kepentingan masyarakat belum tentu menjadi prioritas sebuah media.

Hal tersebut terjadi lantaran jurnalistik *online* kerap mencampuradukkan fakta dan opini. Ardian husaini yang dikutip oleh Kun Wasis dalam bukunya media massa dan konstruksi realitas dalam kode etik jurnalistik PWI ada aturan yang melarang untuk mencampuradukkan antara fakta dan opini (Wasis, 2012). Sehingga masyarakat kini dapat dikonstruksi dengan mudah jika melihat kondisi media saat ini.

Kondisi media *online* yang mengabaikan prinsip-prinsip maupun

etika jurnalistik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu prinsip jurnalistik yang dilanggar adalah faktor netralitas (berimbang). Penyebabnya media *online* lebih mengutamakan impresi dibandingkan peran utamanya. Pemberitaan melihat PSBB hanya sebagai suatu *news value* yang dapat menarik impresi (Isnawijani, 2019). Padahal media diharapkan mampu mensukseskan kebijakan dalam menghadapi pandemi dan memberikan informasi benar kepada masyarakat.

Pemberitaan seputar kebijakan PSBB yang cukup intensif dan dapat menkonstruksi masyarakat disajikan oleh Detik.com dan Narasi.tv. Kedua media memiliki selisih 20 tahun. Detik.com dibentuk pada tahun 1998 setelah runtuhnya orde baru, sedangkan Narasi.tv dibentuk pada tahun 2018 oleh Najwa Shihab jurnalis ternama di Indonesia. Kedua media berhasil menjadi top influencer pada dua media sosial populer di Indonesia yaitu twitter dan instagram.

Media pemberitaan Detik.com merupakan media *online* yang terdiri dari beberapa portal seperti DetikNews, Detikfinance, Detikfood, Detikhot, 20detik, dan masih banyak lagi. Dikutip dari pers.droneemprit.id menyatakan Detik.com sebagai salah satu *top influencer* mendapat 18.830 *engagements*. Sehingga Detik.com memiliki peranan tinggi dalam mengkonstruksi masyarakat.

Gambar 1.

Top 5 *influencer* twitter (sumber: pers.droneemprit.id)

Konstruksi dalam setiap *platform* media sosial memiliki *influencer* tersendiri, begitu juga dengan instagram. Pada media sosial yang satu ini dikutip dari pers.droneemprit.id menempatkan Najwa Shihab pemilik media baru Narasi.tv sebagai *top influencer* pada platform tersebut. Meskipun Narasi.tv masih baru tetapi dengan kepopuleran Najwa Shihab dapat dapat menarik impresi sekaligus mengkonstruksi masyarakat dengan berita-berita yang disajikannya. Media utama Narasi.tv menghadirkan berbagai produk media antara lain Narasi Newsroom, Narasi People, Buka Mata, dan yang paling populer Mata Najwa.

Gambar 2.

Top 5 *influencer* instagram (sumber: pers.droneemprit.id)

Dalam praktiknya, kedua media membangun frame pemberitaan mengenai PSBB di DKI Jakarta dengan pemilihan fakta tertentu dan mengabaikan fakta yang lain dengan strategi wacana. Penerapan strategi tersebut untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita sehingga diterima baik oleh masyarakat (Eriyanto, 2011).

Tidak melihat media pemberitaan apapun, konstruksi yang dibangun pada masyarakat terutama

pada pandemi COVID-19 haruslah pemberitaan yang berstatus *well informed*. Media dituntut ligat mengkomunikasikan informasi berfaedah kepada masyarakat (Isnawijani, 2019). Dalam frame yang dibangun mengenai PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Dalam analisis framing, peristiwa dipahami bukan sesuatu yang *taken for granted*. Tetapi wartawanlah sebagai pembangun realitas. Secara definisi analisis framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh seorang wartawan dalam ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Sobur, 2015).

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis framing oleh Robert N. Etman dengan pendekatan kualitatif. Secara definisi analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana mengkonstruksi realitas dan peristiwa dipahami oleh media (Eriyanto, 2011).

Analisis framing kualitatif dilakukan dengan membandingkan kedua media Detik.com dan Narasi.tv menggunakan empat komponen utamanya. Komponen analisis framing yang dimaksud antara lain; pertama, Definisi masalah (*problem identification*): bagaimana isu atau peristiwa dipahami oleh wartawan. Kedua, Sumber masalah (*casual interpretation*): membingkai siapa tokoh yang akan dijadikan aktor dalam pemberitaan sebuah berita. Ketiga, Menekankan solusi (*treatment recommendation*): penyelesaian isu atau masalah dari realitas yang sudah ditentukan. Keempat, Membuat

keputusan moral (*moral evaluation*): membenarkan atau memberi argumentasi pada realitas.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pencarian pada situs Detik.com dan Narasi.tv dengan kata kunci "PSBB Jakarta" dan saringan rentan pemberlakuan PSBB DKI Jakarta awal pada 1 April 2020 hingga 30 April 2020. Adapun jumlah berita yang didapatkan pada media Detik.com sebanyak 34. Sedangkan Narasi.tv sebanyak 28 berita terdiri dari akun instagram @narasinewsroom sebanyak 14 postingan berita dan program Mata Najwa sebanyak 14 segmen berita. Berita-berita tersebut kemudian diidentifikasi sesuai dengan komponen analisis framing.

Penelitian ini mengidentifikasi berita sesuai bagaimana Etman melihat framing yang terbagi menjadi dua dimensi besar. Dimensi pertama menekankan kepada seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu yang dilihat dari realitas. Framing dalam pemberitaan memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks ditampilkan dan bagaimana yang ditonjolkan atau dianggap penting (Eriyanto, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Frame Media Detik.com

Media pemberitaan berbasis online pertama di Indonesia yaitu Detik.com yang dibentuk pada 30 Mei 1998 dapat diakses secara lengkap pada 9 Juli 1998. Detik.com tidak ketinggalan dalam pembahasan mengenai kebijakan PSBB di DKI Jakarta. Berita pertamanya pada 2 April 2020 dibuka dengan pengajuan PSBB oleh Anies Baswedan kepada Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Indonesia dengan judul

"Anies Kirim Surat Minta Terawan Tetapkan PSBB untuk Jakarta". Kita akan melihat bagaimana Kebijakan PSBB dalam framing Detik.com.

Problem Identification

Frame yang di tonjolkan Detik.com untuk kebijakan PSBB di DKI Jakarta pada April 2020 masuk ke dalam kategori masalah sosial. Alasan mengapa peneliti mengidentifikasi Detik.com melihat kebijakan PSBB sebagai masalah sosial.

Pertama, secara keseluruhan masalah ditarik pada topik sosial. Meski tidak semua berita menyebutkan secara terang-terangan bahwa kondisi ini masuk dalam masalah sosial. Suatu masalah dapat dinyatakan sebagai masalah sosial apabila dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya ada dan disebabkan oleh individu dan juga dipengaruhi orang lain atau sistem (Masrizal, 2015). Dalam pemberitaan yang dibawakan oleh Detik.com digambarkan bahwa masyarakat dirugikan oleh beberapa individu yang tidak menaati protokol kesehatan sehingga menyebabkan penyebaran virus semakin luas.

Kedua, pemilihan judul berita maupun teks berita mempertegas konstruksi COVID-19 merupakan tantangan bagi pemerintah dan penegak hukum. Pilihan kata seperti masyarakat dan warga tidak patuh, pelanggar PSBB, himbuan kepada masyarakat, melanggar PSBB, dan masih banyak lagi.

Casual Interpretation

Dalam berita yang disajikan Detik.com pada periode April 2020, masyarakat dan COVID-19 merupakan aktor utama terhadap kondisi DKI Jakarta, sehingga dibentuklah kebijakan PSBB. Masyarakat juga

diposisikan menjadi korban dari segelintir masyarakat lain yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat tidak secara terang-terangan digambarkan bersalah, tetapi digambarkan tidak patuh sehingga memaksa penegak hukum untuk bertindak.

Sebanyak delapan belas anak muda diamankan dalam patroli pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilaksanakan oleh tim gabungan TNI-Polri di DKI Jakarta pada Jumat (3/4) malam pada pukul 20.00 sampai dengan 22.30 WIB. (Paragraf 3 kalimat pertama dalam berita Detik.com berjudul "Nongkrong di Tengah Wabah Corona, 18 Anak Muda di Jakpus Diamankan Polisi", 04 April 2020).

Detik.com mencoba menjelaskan kepada masyarakat dengan gambaran jumlah signifikan pelanggar PSBB dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Pelanggaran PSBB tersebut berupa tidak menggunakan masker saat di luar rumah, jumlah penumpang melebihi kapasitas kendaraan, dan berboncengan tidak satu KTP. Konstruksi tersebut digambarkan dalam berita berjudul "Fakta-fakta di Balik Wajah Jakarta Selama Sepekan PSBB".

Tercatat 12.606 kasus pelanggaran oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sejak Senin, 13 April, hingga Jumat, 17 April. Para pelanggar tersebut diberi surat teguran. (Paragraf 4 dalam berita Detik.com berjudul "Fakta-fakta di Balik Wajah Jakarta Selama Sepekan PSBB", 18 April 2020).

Detik.com tidak hanya mengkonstruksi masyarakat tidak patuh terhadap protokol sebagai aktor, tetapi juga ikut menarik virus COVID-19 itu sendiri sebagai alasan diberlakukannya kebijakan PSBB. Pada berita berjudul "Sederet Kasus Perampokan Minimarket di Jakarta-Depok selama Pandemi" menggambarkan pergeseran tren kriminal akibat COVID-19. Pada gambaran lainnya, pemberitaan dengan judul "Lebaran di DKI Dipastikan dalam Kondisi PSBB" juga memberikan gambaran bagaimana suatu tradisi pada suatu hari raya yang tidak dapat dilaksanakan akibat COVID-19.

Kejahatan pada masa pandemi Corona ini juga cenderung mengalami pergeseran sasaran. Pelaku yang tadinya menyasar rumah-rumah penduduk kini minimarket jadi incaran. (Paragraf 4 dalam berita Detik.com berjudul "Sederet Kasus Perampokan Minimarket di Jakarta-Depok selama Pandemi", 22 April 2020).

Penyebaran virus Corona di Indonesia belum mereda. Lebaran di DKI pun dipastikan dalam kondisi Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB). (Paragraf 1 kalimat pertama dalam berita Detik.com berjudul "Lebaran di DKI Dipastikan dalam Kondisi PSBB", 23 April 2020).

Moral Evaluation

Konstruksi yang dibangun Detik.com untuk memposisikan masyarakat yang tidak patuh terhadap kebijakan PSBB berdampak terhadap masyarakat lain yang patuh. Berita yang dirilis oleh Detik.com pada 13 April 2020 dengan judul "Sebaran 4.557 Kasus Corona di 34

Provinsi, DKI Jakarta Terbanyak” menjelaskan kondisi Jakarta sebagai episentrum COVID-19. Keesokan harinya, pada 14 April 2020 dirilisnya berita dengan judul “5 Hari Pemberlakuan PSBB di Jakarta, Polisi Sebut Warga Kian Patuh”, pada berita tersebut digambarkan masih adanya pelanggar walau sudah banyak yang mematuhi terhadap protokol kesehatan sesuai kebijakan PSBB.

Tercatat pagi hingga siang, dari ribuan kendaraan, baru ada puluhan yang melanggar. Meliputi 50 pelanggaran tidak menggunakan masker dan 10 pelanggaran physical distancing. (Paragraf 3 kalimat kedua dalam berita Detik.com berjudul "5 Hari Pemberlakuan PSBB di Jakarta, Polisi Sebut Warga Kian Patuh ", 14 April 2020).

Dari kedua berita yang publish secara berdekatan membangun konstruksi bahwa DKI Jakarta sebagai episentrum, meskipun warganya sudah mulai taat dengan protokol kesehatan. Walaupun masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan masih ada, tetapi tidak sebanyak yang sudah menaati peraturan.

Treatment Recommendation

Pemberitaan Detik.com secara tidak langsung mengkonstruksi masyarakat lewat kebijakan PSBB yang dibentuk untuk bekerja sama melawan COVID-19. Masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan akan membantu melawan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta.

Frame Media Narasi.tv

Media pemberitaan Narasi.tv membuka pembahasan mengenai kebijakan PSBB pada program Mata

Najwa yang tayang tanggal 1 April 2020. Pada program tersebut diberikan Judul “Sudah Siapkah Karantina Wilayah” dan dengan lebih spesifik menggali PSBB di DKI Jakarta pada segmen ke tujuh dengan tema “Jakarta Siap Karantina Wilayah?”.

Pemberitaan seputar Kebijakan PSBB di DKI Jakarta terbagi menjadi tiga fase. Fase pertama, pemberitaan pada 1 April 2020 sampai dengan 3 April 2020 menekankan pada alasan pemilihan kebijakan PSBB dibanding karantina wilayah. Fase kedua, pemberitaan pada 7 April 2020 sampai dengan 11 April 2020 berfokus membahas gambaran dan dampak PSBB bagi masyarakat DKI Jakarta. Fase ketiga, pemberitaan pada 13 April 2020 sampai dengan 24 April 2020 yang melihat kondisi transportasi pada peregang PSBB dan meninjau kembali kegiatan PSBB selama 14 hari. Dari tiga fase tersebut dapat dilihat bagaimana Narasi.tv mengkonstruksi kebijakan PSBB di DKI Jakarta.

Problem Identification

Media pemberitaan Narasi.tv mengkonstruksi kebijakan PSBB di DKI Jakarta sebagai masalah politik. Ada dua alasan utama mengapa peneliti dapat menyimpulkan kebijakan ini selalu frame sebagai masalah politik. Pertama, dalam pandangan Narasi.tv kebijakan PSBB selalu dikaitkan dengan Undang-Undang dan peraturan dibuat oleh Pemerintah Pusat yang syarat akan kebijakan politik yang ada.

Provinsi DKI Jakarta merupakan Provinsi pertama di Indonesia, yang memberlakukan kebijakan PSBB baru disusul oleh daerah lainnya. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),

Kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi memiliki interaksi yang sama tinggi, sehingga membuat DKI Jakarta dengan penduduk 10,57 juta orang (Survei penduduk antar sensus) rentan akan penyebaran COVID-19. Kedua, Sumber berita selalu berkaca pada referensi aktor-aktor politik di Indonesia, seperti Presiden Joko Widodo, Gubernur Anies Baswedan, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Casual Interpretation

Dalam penyajian berita yang disajikan pada periode April 2020 Narasi.tv mengkonstruksi Pemerintah sebagai aktor utama dalam penyebaran COVID-19. Konstruksi yang dibangun dengan kebijakan PSBB merupakan produk kebijakan yang kurang tegas dan hanya mempertegas physical distancing yang sudah dilakukan. Sesuai dengan kutipan berikut:

Pembatasan ini sebenarnya sudah berjalan beberapa pekan terakhir di Jakarta, PSBB dalam konteks ini hanya penegasan dari imbauan physical distancing oleh pemerintah. (Paragraf 2 dalam berita narasinewsroom berjudul "PSBB Diberlakukan di Jakarta, Apa Konsekuensinya?", 07 April 2020).

Narasi.tv berusaha mengkonstruksi Pemerintah sebagai aktor utama dan memposisikan Provinsi DKI Jakarta sebagai korban dari Pemerintah Pusat. Selain DKI Jakarta, Daerah penopang Ibu Kota "Bodetabek" dan provinsi di sekitarnya ditegaskannya juga sebagai korban melalui kutipan berikut:

Berlikunya permintaan izin penerapan PSBB dari DKI Jakarta kepada

pemerintah pusat seharusnya tidak terulang untuk daerah lain seperti Kota Bogor dan Jawa Barat, sebagai wilayah yang beririsan dengan episentrum wabah. (Paragraf 1 dalam berita narasinewsroom berjudul "Berbelit Urus Corona", 9 April 2020).

Secara spesifik korban yang dimaksud dalam kebijakan PSBB antara lain usaha kecil, warga pengguna KRL, dan ojek online. Dalam konstruksi yang dibangun Narasi.tv juga memposisikan Pemerintah perlahan mematikan usaha kecil.

Banyak bisnis termasuk warung tadi, terdampak langsung karena pembeli menurun drastis. Sebagian lainnya berinisiatif memanfaatkan layanan pesan-antar, meskipun potensi rugi tetap ada. (Narasi dalam berita narasinewsroom berjudul "PSBB Belum Diberlakukan Merata, Bagaimana Nasib Usaha Kecil?", 9 April 2020)

Di sisi lain, pemerintah justru meminta minimarket, supermarket, dan hypermarket untuk buka lebih lama (Pasal 7 ayat 2 Perpres Nomor 112 Tahun 2007). Ini berpotensi mematikan ekonomi kecil dan menengah, meski pemerintah mengantisipasinya dengan stimulus KUR dan kartu pra-kerja. (Narasi dalam berita narasinewsroom berjudul "PSBB Belum Diberlakukan Merata, Bagaimana Nasib Usaha Kecil?", 9 April 2020)

Persoalan ojek online menjadi sorotan Narasi.tv, sebelumnya pada program Mata Najwa yang tayang 8 April 2020. Pada segmen kedua Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menekankan ojek online dapat beroperasi. Ternyata keputusan tersebut berbenturan dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Narasi.tv berusaha mengkonstruksi Pemerintah Pusat tidak bisa berkoordinasi baik dengan Pemprov DKI Jakarta.

Tidak sinkronnya kerja antara pemerintah pusat dan daerah kembali tercermin dari adanya peraturan yang bertabrakan. Perihal boleh atau tidaknya sepeda motor berbasis aplikasi mengangkut penumpang di wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (Paragraf 1 dalam berita narasinewsroom berjudul "Tarik Ulur Aturan Ojol di PSBB: Boleh Angkut Penumpang atau Tidak", 09 April 2020).

Moral Evaluation

Penilaian mengenai kinerja pemerintah yang dibangun dalam pemberitaan Narasi.tv dapat dilihat dengan tiga poin berikut. Pertama, munculnya tuduhan pemerintah yang lamban. Walau tidak secara spesifik menyatakan bahwa Pemerintah lamban tetapi Narasi.tv berusaha menggambarkan kondisi yang seharusnya bisa dibendung jika Pemerintah sigap dalam mengambil keputusan.

Penyebaran virus corona semakin menjadi-jadi, Jakarta bukan satu-satunya yang dirundung pandemi, zona merah mulai bermunculan dimana-mana seiring laju perpindahan warga dari Ibu Kota. Hampir seluruh Provinsi sudah dijamah corona, langkah komprehensif mesti di ambil sekarang juga. (Pembukaan segmen pembahasan seputar "karantina wilayah" pada tayangan Mata Najwa, 01 April 2020).

Penilaian kedua, berhubungan dengan pemerintah menghindari kata "karantina wilayah" dengan alasan menghindari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Pernyataan tersebut didukung oleh Agus Pambagio sebagai Pengamat Kebijakan Publik yang dijadikan caption postingan berita Mata Najwa.

Presiden mungkin menghindar menggunakan istilah lockdown karena ada konsekuensi dana yang harus dipertimbangkan. (Caption video postingan Mata Najwa "Berbelit Urus Corona", 8 April 2020).

Ketiga, Pemerintah tidak dapat berkoordinasi atau bekerjasama dengan baik sehingga membuat kebijakan tumpang tindih dengan ketentuan PSBB yang diusung oleh DKI Jakarta. Hal tersebut ditegaskan melalui kutipan berikut:

Tidak ada waktu berlama-lama karena virus menjalar tanpa banyak pertimbangan. Mengapa koordinasi dirasa belum begitu padu, hambatan mana yang harus di cabut terdahulu? Inilah Mata Najwa "Saatnya Karantina". (Pembukaan segmen pembahasan seputar "karantina wilayah" pada tayangan Mata Najwa, 01 April 2020).

Treatment Recommendation

Peran yang digambarkan oleh Narasi.tv, merekomendasikan agar Pemerintah tanggap dengan penyebaran COVID-19. Melihat bahwa DKI Jakarta merupakan episentrum penyebaran virus, sudah seharusnya kebijakan PSBB dimatangkan dan diberikan kejelasan dengan cepat.

Table 1. Konstruksi PSBB di Detik.com dan Narasi.tv

Detik.com	Narasi.tv
<i>Problem Identification</i> Masalah Sosial	<i>Problem Identification</i> Masalah Politik
<i>Causal Interpretation</i> Masyarakat yang tidak taat dan COVID-19, Masyarakat yang tidak taat dan COVID-19 adalah menyebabkan banyaknya masyarakat lainnya yang berdampak secara ekonomi.	<i>Causal Interpretation</i> Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat adalah aktor yang membuat COVID-19 menyebar ke berbagai daerah, sedangkan DKI Jakarta diposisikan sebagai korban dari pemerintah.
<i>Moral Evaluation</i> Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun kesadaran masyarakat akan COVID-19.	<i>Moral Evaluation</i> Pemerintah Pusat lamban, tidak bertanggung jawab, dan tidak dapat bekerjasama dengan baik.
<i>Treatment Recommendation</i> Masyarakat dan Pemerintah DKI Jakarta bekerjasama dalam menangani COVID-19.	<i>Treatment Recommendation</i> Pemerintah haruslah lebih tanggap dalam menghadapi COVID-19.

Sumber: Dikelola oleh peneliti

KESIMPULAN

Dari analisis framing oleh Robert N. Etman mengenai pemberitaan PSBB DKI Jakarta

periode April 2020 di media online Detik.com dan Narasi.tv yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) *Problem Identification*; pemberitaan online menafsirkan dua masalah berbeda yaitu masalah sosial dan politik. (2) *Causal Interpretation*; sesuai dengan permasalahan pada masalah politik cenderung menempatkan pemerintah sebagai aktor utama sedangkan pada masalah sosial cenderung menempatkan masyarakat dan virus COVID-19 sebagai aktor utama. Tetapi, dari kedua media sepakat memposisikan masyarakat sebagai korban. (3) *Moral Evaluation*; media Detik.com mengajak Masyarakat dan Pemerintah DKI Jakarta bekerjasama dalam menangani COVID-19. Sebagaimana masalah yang ditarik Detik.com adalah masalah sosial, sedangkan Narasi.tv menggambarkan Pemerintah Pusat lamban, tidak bertanggung jawab, dan tidak dapat bekerjasama dengan baik dengan pemerintah daerah. (4) *Treatment Recommendation*; Detik.com mengajak Masyarakat dan Pemerintah DKI Jakarta bekerjasama dalam menangani COVID-19. Sedangkan, Narasi.tv memberikan masukan terhadap Pemerintah agar lebih tanggap dalam menghadapi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eriyanto. 2011. *Analisis Framing*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang.
- Fikri. 2015. *Konflik Agama dan Konstruksi New Media*. Malang: UB PRESS.
- Gorbalenya, Alexander E., Susan C.

- Baker, Ralph S. Baric, Raoul J. de Groot, Christian Drosten, Anastasia A. Gulyaeva, Bart L. Haagmans, Chris Lauber, Andrey M. Leontovich, Benjamin W. Neuman, Dmitry Penzar, Stanley Perlman, Leo L. M. Poon, Dmitry V. Samborskiy, Igor A. Sidorov, Isabel Sola, dan John Ziebuhr. 2020. "The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2." *Nature Microbiology* 5(4):536-44. doi: 10.1038/s41564-020-0695-z.
- Isnawijani. 2019. *Menulis Berita di Media Massa & Produk Feature*. Yogyakarta: ANDI.
- Masrizal. 2015. *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*. Banda Aceh: Syah Kuala University Press.
- Nasruddin, Rindam, dan Islamul Haq. 2020. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7(7). doi: 10.15408/sjsbs.v7i7.15569.
- Rahadi. 2019. "Kampanye Politik di Media Online: Analisis Framing Pada Situs Pendahuluan Pasca reformasi, media massa memegang peranan penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Kekuasaan media dalam menyajikan atau melaporkan peristiwa-peristiwa politik dalam ben." 5(1):82-102.
- Shoemaker, Pamela Reese, Stephen. 2014. *Mediating the Message in the 21st Century*. 3 ed. New York: Longman.
- Sobur, Alex. 2015. *Analisis Text Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suparno, Bambang. 2018. *Ilmu Hukum Tata Negara*. Surabaya: UBHARA PRESS.
- Wasis, Kun. 2012. *Media Massa dan Konstruksi Realitas*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Artikel**
http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No_HK_01_07-MENKES-239-2020_ttg_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_di_DKI_Jakarta.pdf
<https://www.narasi.tv/>
<https://trends.google.com/>
https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/19070902532012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf
<https://nasional.kontan.co.id/news/jusuf-kalla-butuh-tegas-virus-corona-tak-bisa-diajak-damai>
<https://news.detik.com/>
<https://pers.droneemprit.id/analisis-media-sosial-dan-media-online-tentang-covid-19-di-dki-jakarta/>
- Jurnal online**
Eriyanto. 2011. *Analisis Framing*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang.
- Fatoni, A., & Anestha, P. (2021). Communication Network Analysis #tetapdukungsbb Conversation in Twitter on Second Implementation of the PSBB in DKI Jakarta. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 8(2), 177 - 200. <https://doi.org/10.37826/spektrum.v8i2.115>
- Fikri. 2015. *Konflik Agama dan Konstruksi New Media*. Malang: UB PRESS.
- Gorbalenya, Alexander E., Susan C. Baker, Ralph S. Baric, Raoul J. de Groot, Christian Drosten, Anastasia A. Gulyaeva, Bart L.

- Haagmans, Chris Lauber, Andrey M. Leontovich, Benjamin W. Neuman, Dmitry Penzar, Stanley Perlman, Leo L. M. Poon, Dmitry V. Samborskiy, Igor A. Sidorov, Isabel Sola, dan John Ziebuhr. 2020. "The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2." *Nature Microbiology* 5(4):536-44. doi: 10.1038/s41564-020-0695-z.
- Isnawijani. 2019. *Menulis Berita di Media Massa & Produk Feature*. Yogyakarta: ANDI.
- Kurniawan, Herik. (2020). Strengthening IJTI Organization through Whatsapp Chat Group Communication During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 8(2), 201 - 216.
<https://doi.org/10.37826/spektrum.v8i2.118>
- Masrizal. 2015. *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*. Banda Aceh: Syah Kuala University Press.
- Nasruddin, Rindam, dan Islamul Haq. 2020. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7(7). doi: 10.15408/sjsbs.v7i7.15569.
- Rahadi. 2019. "Kampanye Politik di Media Online: Analisis Framing Pada Situs Pendahuluan Pasca reformasi , media massa memegang peranan penting dalam kehidupan politik di Indonesia . Kekuasaan media dalam menyajikan atau melaporkan peristiwa-peristiwa politik dalam ben." 5(1):82-102.
- Shoemaker, Pamela Reese, Stephen. 2014. *Mediating the Message in the 21st Century*. 3 ed. New York: Longman.
- Sobur, Alex. 2015. *Analisis Text Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suparno, Bambang. 2018. *Ilmu Hukum Tata Negara*. Surabaya: UBHARA PRESS.
- Wasis, Kun. 2012. *Media Massa dan Konstruksi Realitas*. Yogyakarta: Aditya Media.